PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAIN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Lukman Hakim Harahap¹, Ibnu Zarir², Muhammad Fadil³, Chairul Azmi Nasution⁴, Irfan Maulana Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negri Sumatera Utara, Indonesia

lukman1100000208@uinsu.ac.id¹, zariribnu10@gmail.com², masterm.fadil@gmail.com³, cazminst@gmail.com⁴, irfanayahmama2211@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The aim of this research is to identify and analyze the practice of sending migrant workers as a form of modern slavery in the context of criminal acts of human trafficking, the factors that encourage human trafficking through sending migrant workers, as well as prevention and law enforcement efforts that can be improved in dealing with the problem. This. In this thesis research, the author uses a type of library research, namely a series of activities related to library data collection methods. The specifications for this writing are descriptive analysis, in accordance with the problems and objectives of this research. The research results show that the practice of sending migrant workers often reflects a form of modern slavery, with migrant workers experiencing extreme exploitation, loss of freedom, and becoming victims of human trafficking. Factors such as economic uncertainty, social injustice, and demand for labor in the destination country are the main drivers of human trafficking through the sending of migrant workers. Enhanced prevention and law enforcement efforts, including increasing awareness, strengthening regulations, firm law enforcement, and increasing migrant workers' access to protection services, are key in overcoming this problem. Thus, this research contributes to understanding and efforts to overcome the practice of modern slavery through sending migrant workers.*

Keywords: *Delivery, Migraine Labor, Slavery, Human Trafficking*

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pengiriman tenaga kerja migran sebagai bentuk perbudakan modern dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang melalui pengiriman tenaga kerja migran, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dapat ditingkatkan dalam menghadapi masalah ini. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Spesifikasi penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis, sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengiriman tenaga kerja migran sering kali mencerminkan bentuk perbudakan modern, dengan para pekerja migran mengalami eksploitasi ekstrem, kehilangan kebebasan, dan menjadi korban perdagangan manusia. Faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi, ketidakadilan sosial, dan permintaan tenaga kerja di negara tujuan menjadi

pendorong utama terjadinya perdagangan orang melalui pengiriman tenaga kerja migran. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang ditingkatkan, termasuk peningkatan kesadaran, perkuatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan akses para pekerja migran terhadap layanan perlindungan, menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman dan upaya penanggulangan praktik perbudakan modern melalui pengiriman tenaga kerja migran.

Kata Kunci: Pengiriman, Tenaga Kerja Migrain, Perbudakan, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan nasional, mewujudkan kemandirian, keadilan, dan menjaga moralitas agama. Namun kenyataannya, masih ada masyarakat Indonesia yang tidak menikmati kesejahteraan dan bahkan lebih cenderung menjadi 'budak', tidak mengikuti rencana pembangunan negara dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). (Henny Nulaeni, 2015)

Hak asasi manusia (fundamental right) adalah hak yang mendasar (rasional), mendasar, dan fundamental. Artinya hak asasi manusia itu istimewa, apalagi hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tidak menciptakannya, sehingga tidak dapat dibatalkan. Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk negara, hukum, masyarakat dan semua individu, untuk menjunjung tinggi dan melindunginya dimanapun dan kapanpun ditemukan. Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak di bidang sipil, politik, sosial dan ekonomi, termasuk hak untuk hidup bebas dari ancaman yang merendahkan martabat manusia. Salah satu praktik yang dianggap melanggar martabat manusia adalah perbudakan. (Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011)

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia. Pekerja migran biasanya diekspor dengan berbagai cara, baik legal maupun ilegal. Transportasi ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan perdagangan manusia. Pemerintah juga menganggap perbudakan modern merupakan salah satu jenis kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak jauh lebih rentan terhadap kekerasan, terutama perdagangan manusia yang merupakan wujud perbudakan modern, sehingga mereka lebih terlindungi dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, perdagangan manusia tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun juga mencakup aspek

yang melanggar perlindungan dan kesejahteraan umum. Selain itu, tindakan perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai ancaman dan tindakan kekerasan, apalagi korban perdagangan orang pada umumnya adalah orang-orang yang berada dalam keadaan tidak berdaya baik secara fisik maupun batin. (perempuan dan anak), psikologis dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil upaya atau kebijakan hukum dengan meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait hak asasi manusia. (Henny Nulaeni, 2015)

Perdagangan orang sendiri diatur lebih jelas dan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Simak sejumlah kasus perdagangan manusia yang mendapat banyak perhatian. Namun jika membahas pekerja migran Indonesia, tentu saja akan mengarah pada peraturan lain yang membahas tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan lainnya. Mengingat adanya asas hukum internasional yaitu asas kewarganegaraan, bahwa “negara Indonesia sebagai negara hukum berhak menerapkan peraturan hukum kepada warga negaranya dimanapun ia berada.” (Rizki Dui Utami, 2022)

Perdagangan manusia untuk tujuan pekerjaan merupakan masalah besar. Data perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 1993 hingga 2003 menunjukkan bahwa perdagangan manusia sering terjadi melalui pencarian kerja, dan perempuan serta anak juga mengalaminya. Korban perdagangan manusia menghadapi berbagai akibat, biasanya terkait dengan prostitusi (PSC) dan eksploitasi tenaga kerja. Sebaliknya dari segi pidana, hal ini biasa dilakukan dan dilakukan oleh penyalur tenaga kerja dalam bentuk janji suatu pekerjaan. Kami merekrut orang-orang yang benar-benar menginginkan pekerjaan tersebut baik secara pasif (mengiklankan lowongan pekerjaan) maupun secara proaktif (mengunjungi rumah mereka). Eksploitasi tenaga kerja ini memaksa pekerja untuk melakukan sistem kerja paksa tanpa upah, kondisi kerja, atau perlindungan kerja yang pasti. (M.Mahfuz, 2019)

Tujuan utama orang bepergian dan bekerja ke luar negeri adalah untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan iming-iming gaji yang tinggi itulah yang mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri demi mewujudkan impiannya, hidup berkecukupan, dan hidup sejahtera. Dan faktor lain yang menyebabkan hal tersebut adalah sulitnya mencari dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Nampaknya lapangan kerja di negeri ini terisi oleh ribuan bahkan jutaan orang, sehingga tidak ada peluang bagi generasi angkatan kerja berikutnya. (Devi Prathivi dkk., 2021)

Karena terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri, banyak warga negara Indonesia atau TKI yang mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur formal maupun informal, sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka yang ingin mencari nafkah di dalam negeri. Banyaknya jumlah tenaga kerja atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi salah satu tanda ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan TKI sangatlah kompleks, dan selain penanganan rekrutmen TKI, inisiatif lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan kebijakan pemerintah yang mengubah strategi rekrutmen TKI. (Nazaruddin Malik, 2016)

Berbagai faktor berkontribusi terhadap prevalensi perdagangan buruh migran dan perbudakan modern. Kemiskinan dan kendala ekonomi di Indonesia memaksa banyak orang mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup diri dan keluarganya. Namun, pekerja migran kurang memiliki pendidikan dan informasi mengenai hak-hak mereka serta risiko yang mereka hadapi, sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh agen perekrutan yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab memperburuk situasi ini karena mereka sering memberikan informasi yang menyesatkan kepada calon pekerja migran. Situasi ini semakin diperburuk oleh kurangnya pengawasan pemerintah dan penegakan hukum yang efektif terhadap agen tenaga kerja ilegal dan majikan yang melanggar hukum. Praktik ini terus berlanjut karena lemahnya regulasi dan penegakan hukum membuat sulit untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas perdagangan manusia dan perbudakan modern. Akibat yang ditimbulkan sangat parah bagi para korban, termasuk kerugian fisik dan psikologis jangka panjang, hilangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Bagi negara asal seperti Indonesia, permasalahan ini merusak citra negara di mata internasional dan menghambat pengembangan sumber daya manusia. Negara-negara tujuan pekerja migran juga menghadapi tantangan sosial dan moral akibat adanya perbudakan modern di wilayahnya. Untuk mengatasi tantangan ini memerlukan upaya bersama dari berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap penempatan pekerja migran, serta memberikan pendidikan komprehensif kepada calon pekerja migran tentang hak-hak mereka, risiko yang mereka hadapi, dan cara melindungi diri dari eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud, 2011) Penelitian ini menggunakan metode normatif/yuridis normatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan (angka-angka), namun mencoba melihat hubungan antara manusia dan budaya hukumnya. (Arief Furchan, 1997). Spesifikasi penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis, sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum terkait pengiriman tenaga kerja migraine sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dari tindak pidana perdagangan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Pengiriman Tenaga Kerja Migran Dapat Dikategorikan Sebagai Bentuk Perbudakan Modern Dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penempatan pekerja migran merupakan fenomena global yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas dan globalisasi. Pekerja imigran seringkali mencari peluang ekonomi yang lebih baik di negara-negara yang upahnya lebih tinggi dibandingkan di negara asal mereka. Namun, di balik harapan dan aspirasi tersebut, banyak orang yang terjebak dalam kondisi kerja yang eksploitatif dan tidak manusiawi. Praktik-praktik seperti ini seringkali dianggap sebagai bentuk perbudakan modern, khususnya dalam konteks kejahatan perdagangan manusia. (Soejono Didiosiswolo, 2002)

Perbudakan modern mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk kerja paksa, perbudakan hutang, perdagangan seks, dan kondisi kerja yang sangat tidak adil dan buruk. Terkait dengan pekerja migran, banyak dari mereka yang dipaksa bekerja di bawah intimidasi, kekerasan dan intimidasi, dan seringkali dibayar rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Mereka mungkin juga berada dalam situasi di mana paspor mereka disita, pergerakan mereka dibatasi, dan mereka menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi. Tindakan-tindakan ini seringkali merupakan hasil dari jaringan perdagangan manusia terorganisir yang mengeksploitasi kerentanan individu dan kurangnya peraturan yang efektif. Pekerja migran

yang menjadi korban sistem ini sering kali menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan terus-menerus.

Praktik pengiriman buruh migran dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan modern dalam konteks kejahatan perdagangan manusia, karena banyak faktor dan karakteristik yang sama dengan perbudakan tradisional. Berikut beberapa alasan mengapa praktik pengiriman TKI dianggap sebagai bentuk perbudakan modern dalam konteks kejahatan perdagangan manusia: (Setiono, 2020).

a. eksploitasi dan kontrol yang ekstrim

Pekerja migran sering kali mengalami eksploitasi ekstrem yang dilakukan oleh pihak yang mengirimnya. Mereka seringkali diperlakukan tidak manusiawi, dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya dan tidak diberi hak. Hal ini mencerminkan kontrol ekstrim atas kehidupan dan kebebasan manusia yang merupakan ciri utama perbudakan.

b. pembatasan kebebasan

Pekerja migran seringkali kehilangan kebebasan untuk memilih dan mengendalikan nasibnya sendiri. Mereka terikat pada kontrak kerja yang tidak menguntungkan, terjebak dalam lingkaran setan hutang yang tidak dapat mereka bayar kembali, dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini serupa dengan pembatasan kebebasan yang dihadapi para budak dalam perbudakan tradisional.

c. Perdagangan manusia

Pengiriman buruh migran seringkali dikaitkan dengan tindakan perdagangan manusia, dimana manusia dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Mereka seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tidak adil, tanpa hak untuk memilih atau menolak pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka.

d. kekerasan dan intimidasi

Pekerja migran seringkali menjadi korban kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Mereka diintimidasi untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh majikan mereka. Ancaman dan kekerasan ini menciptakan lingkungan yang berbahaya dan menindas serupa dengan kondisi yang dialami para budak selama perbudakan.

Mengingat faktor-faktor di atas, maka praktik pengiriman buruh migran merupakan salah satu bentuk perbudakan modern dalam konteks eksploitasi, pembatasan kebebasan, perdagangan manusia, dan kejahatan perdagangan manusia akibat kekerasan dan intimidasi terhadap buruh migran. menjadi sasaran. . Perlindungan dan tindakan pencegahan yang lebih efektif harus diambil untuk memerangi praktik ini dan melindungi hak-hak pekerja migran.

2. Faktor Penyebab yang Mendorong Terjadinya Perdagangan Orang Melalui Pengiriman Tenaga Kerja Migran

Perdagangan manusia adalah masalah global yang kompleks dan mengakar yang berdampak pada jutaan korban, seringkali terjebak dalam jaringan eksploitasi tanpa jalan keluar yang jelas. Salah satu jalur utama terjadinya perdagangan manusia adalah melalui pengiriman pekerja migran. Fenomena ini menjadi permasalahan serius tidak hanya bagi negara asal pekerja, namun juga bagi negara tujuan. Memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan pekerja migran merupakan langkah penting dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah ini. Faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap perdagangan pekerja migran bisa beragam dan kompleks. Faktor-faktor yang dapat memfasilitasi perdagangan manusia melalui penempatan pekerja migran meliputi: (Gigin Aulia, 2022)

a. ketidakpastian ekonomi

Kondisi perekonomian yang tidak stabil di negara asal pekerja migran dapat mendorong mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan dukungan keuangan kepada keluarga mereka. Kondisi ekonomi yang sulit ini dapat menempatkan pekerja migran pada risiko perekrutan ilegal, yang sebenarnya merupakan tindakan perdagangan manusia.

b. ketidakadilan sosial

Ketidakadilan sosial seperti ketimpangan pendapatan, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap peluang kerja yang layak di negara asal pekerja migran dapat mendorong pekerja migran untuk mencari peluang di luar negeri. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia untuk merekrut dan mengeksploitasi pekerja migran.

c. Ketidakpastian dan perlindungan hukum

Kurangnya perlindungan hukum dan keamanan bagi pekerja migran di negara asal dan tujuan dapat menjadi pemicu terjadinya perdagangan manusia. Pekerja migran yang tidak memiliki akses terhadap sistem dan perlindungan hukum yang memadai dapat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan.

d. **Permintaan tenaga kerja di tempat tujuan**

Permintaan tenaga kerja murah dan tidak terampil di negara tujuan dapat mendorong terjadinya tindakan perdagangan manusia melalui pengiriman pekerja migran. Agen perekrutan dan agen tenaga kerja dapat mengeksploitasi permintaan pasar untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi pekerja migran.

e. **korupsi dan kejahatan terorganisir**

Adanya korupsi dalam penempatan pekerja migran dan keterlibatan dalam kejahatan terorganisir dapat meningkatkan perdagangan manusia. Organisasi kriminal yang terorganisasi dengan baik dapat memfasilitasi pergerakan ilegal pekerja migran dan mengeksploitasi mereka untuk keuntungan ekonomi.

Memahami faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia melalui penempatan pekerja migran dapat membantu mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif untuk memerangi praktik perdagangan manusia dan melindungi hak-hak.

3. Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Bentuk Perbudakan Modern dapat Ditingkatkan

Upaya pencegahan dan penegakan praktik pengiriman pekerja migran sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dapat ditingkatkan melalui serangkaian upaya yang komprehensif dan kolaboratif. Hal ini mencakup kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran terhadap pekerja migran, memperkuat peraturan, dan meningkatkan penegakan praktik eksploitatif. (Henny Nulaeni, 2015)

Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi pengiriman pekerja migran ilegal. Pendidikan dan dukungan intensif dapat membantu pekerja migran dan masyarakat umum mengenali tanda-tanda perdagangan manusia dan melaporkannya kepada pihak berwenang. (Mahendra Kusuma, 2020)

Kedua, perlunya penguatan kerja sama antar negara asal dan tujuan pekerja migran dalam pertukaran informasi dan koordinasi kegiatan penegakan hukum. Hal ini membantu melacak pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan aktivitas eksploitatif.

Selain itu, peraturan dan mekanisme pengawasan terhadap agen tenaga kerja dan perekrut pekerja migran perlu diperkuat. Penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal dan eksploitasi dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari pekerja migran. Pemerintah juga perlu meningkatkan akses pekerja migran terhadap layanan perlindungan seperti perwakilan hukum, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Hal ini membantu pekerja migran melindungi diri mereka dari risiko eksploitasi dan pelecehan. Saya harap, melalui langkah-langkah komprehensif dan kolaboratif ini, kami akan meminimalkan praktik pengiriman pekerja migran sebagai bentuk perbudakan modern dan memastikan bahwa pekerja migran dapat bekerja dalam kondisi yang aman, adil dan manusiawi. (Henny Nulaeni, 2015).

KESIMPULAN

Praktik pengiriman tenaga kerja migran sering kali mencerminkan bentuk perbudakan modern dalam konteks tindak pidana perdagangan orang. Para pekerja migran sering mengalami eksploitasi yang ekstrem, kehilangan kebebasan, dan menjadi korban perdagangan manusia serta terancam oleh kekerasan dan ancaman. Faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kekurangan perlindungan hukum merupakan pendorong utama terjadinya praktik ini.

Dalam pembahasan kedua, kita memahami bahwa perdagangan orang melalui pengiriman tenaga kerja migran dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks seperti ketidakpastian ekonomi, ketidakadilan sosial, dan permintaan tenaga kerja di negara tujuan. Kurangnya perlindungan hukum dan keamanan juga menjadi faktor yang memperkuat praktik perdagangan orang ini.

Terakhir, kita melihat bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik pengiriman tenaga kerja migran sebagai bentuk perbudakan modern dapat ditingkatkan melalui langkah-langkah komprehensif dan kolaboratif. Hal ini termasuk peningkatan kesadaran, penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan akses para pekerja migran terhadap layanan perlindungan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa praktik pengiriman tenaga kerja migran sebagai bentuk perbudakan modern merupakan

masalah yang kompleks dan memerlukan respons yang holistik dari berbagai pihak untuk mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Furchan. (1997), *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Devi Pratiwi, et. al. (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migrain Indonesia Tanpa Izin Resmi (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn)*. Jurnal Transparansi Hukum. Volume 4 No. 1
- Gigin Auliya. (2022), *Faktor-Faktor pekerja Migran Indonesia bekerja di Luar Negeri: Studi Kasus Kabupaten Sambas*. [Tanjungpura University](http://www.tanjungpura.ac.id)
- Henny Nuraeny. (2015), *Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4. No. 3
- M. Makhfudz. (2013), *Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal Hukum. Volume 4. No. 1
- Mahendra Kusuma. (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Manusia Berkedk Pengiriman Pekerja Migrain Indonesia*. Jurnal Hukum. Volume 6 No. 1
- Mahmud. (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out System*, Jakarta: Gramata Publishing 2011
- Nazaruddin Malik. (2016), *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Setiono. (2020), *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*. Jakarta: International Organization
- Soedjono Dirdjosisworo. (2002), *Respon Terhadap Kejahatan*, Bandung: STHB Press